

Implementasi Program Pembiayaan Keuangan Mikro Kelompok Usaha Perempuan Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Gempol

Oleh:

Abdul Khafidz

Isna Fitria Agustina

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Agustus, 2024



Pendahuluan

1 Masyarakat desa dengan latar belakang yang heterogen memiliki tujuan hidup yang sama, yakni menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi, dari latar belakang setiap keluarga baik dari segi pendidikan, keterampilan tidaklah sama. Sehingga, dengan status sebagai masyarakat desa yang belum terakomodir dalam dunia kerja menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk melakukan pemberdayaan melalui program-program pemberdayaan.

2 Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang merupakan perwujudan Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa BUM Desa dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyangan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

3 Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

4 Tujuan pembentukan BUM Desa untuk: 1) menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat; 2) meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah; 3) memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan; 4) mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; 5) mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; 6) meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; 7) menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan

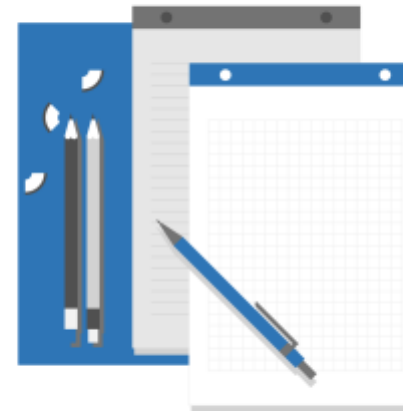
Data Empiris

Tabel 2. Alokasi Pinjaman, Tahun 2022

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok	Jumlah Pemanfaat	Alokasi Pinjaman
1	Wonosunyo	116	1176	4.795.300.000,-
2	Sumbersuko	29	197	453.200.000,-
3	Wonosari	23	186	392.000.000,-
4	Kepulungan	42	255	664.100.000,-
5	Randupitu	6	74	59.000.000,-
6	Ngerong	155	839	2.430.900.000,-
7	Karangrejo	111	495	1.636.384.000,-
8	Bulusari	91	458	1.744.200.000,-
9	Jerukpurut	17	175	317.000.000,-
10	Watakosek	133	1025	3.709.050.000,-
11	Carat	136	886	3.201.550.000,-
12	Kejapanan	24	199	409.500.000,-
13	Winong	37	416	1.129.050.000,-
14	Legok	167	1422	5.146.450.000,-
15	Gempol	186	1384	5.337.250.000,-
	Total	1.273	9.186	31.423.934.000,-

Tabel 3. Data Surplus/ Pendapatan Tahun 2019-2022

Keterangan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Surplus	259.065.736	220.863.817	183.051.792	119.539.563



Gap Masalah



1. Kelompok usaha perempuan yang sudah difasilitasi pembiayaan, tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan modal usahanya
2. Kecenderungan Surplus atau pendapatan BUMDESMA “Gempol Sejahtera” semakin tahun semakin menurun, dikarenakan banyaknya tunggakan.
3. Platform atau Pagu pinjaman terlalu kecil, untuk penambahan modal atau membuka usaha baru tidak mencukupi kebutuhan kelompok usaha perempuan.

Rumusan Masalah



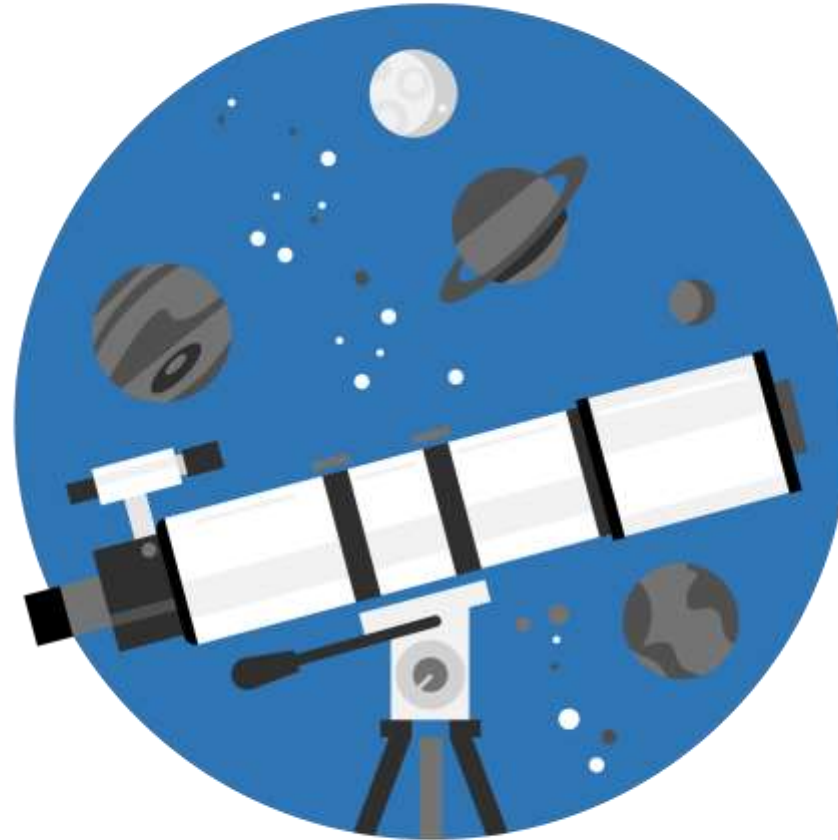
Bagaimana Program Pembiayaan Keuangan Mikro yang dijalankan oleh BUMDESMA "Gempol Sejahtera" Kecamatan Gempol

?

Penelitian Terdahulu

Fitrotun Niswah Universitas
Negeri Surabaya (2021)

Strategi Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa Bersama
(BUMDESMA) di
Kecamatan Sumbergempol
Kabupaten Tulungagung



I Gde Kajeng Baskara,
Universitas Udayana (2013)

Lembaga keuangan mikro (LKM)
merupakan salah satu pilar dalam
proses intermediasi keuangan.

Gap Penelitian



Gap penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perbedaan tersebut ialah penulis akan meneliti dan berfokus pada aktifitas Lembaga Keuangan Mikro BUMDESMA “Gempol Sejahtera” dan pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) untuk kelompok masyarakat khusus perempuan, kelanjutan dari program Eks PNPM-MPd dengan regulasi baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Desa PDTT.

Metode



Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif



Sumber Data

Data Primer dan Data Sekunder



Lokasi Penelitian

BUMDesa Bersama “Gempol Sejahtera”
Kecamatan Gempol



Teknik Pengumpulan Data

Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi



Teknik Analisis Data

Melalui empat tahapan yakni,

- 1) Pengumpulan Data;
- 2) Reduksi data;
- 3) Penyajian data; dan
- 4) Penarikan kesimpulan



Fokus Penelitian

Berfokus pada aktifitas Lembaga Keuangan Mikro BUMDESMA “Gempol Sejahtera” dan pengelolaan DBM untuk kelompok masyarakat khusus perempuan, dengan merujuk pada Teori Gorge C. Edward III, berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- 1) Komunikasi;
- 2) Sumber Daya;
3. Diskripsi; dan
4. Struktur Birokrasi



Hasil dan Pembahasan

2) SUMBER DAYA

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sumber daya menunjukkan ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, sangatlah penting untuk keberhasilan Program Pembiayaan Keuangan Mikro di BUMDESMA “Gempol Sejahtera”. Sumber daya finansial yang memadai memastikan bahwa program dapat menyediakan pinjaman yang dibutuhkan oleh kelompok usaha perempuan untuk mengembangkan bisnisnya.

Perkembangan Dana mencerminkan keberhasilan pengelolaan yang konsisten dan efektif, serta komitmen yang kuat dalam mengembangkan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan. Surplus menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan BUMDESMA “Gempol Sejahtera” mampu memberikan dampak positif dan nyata bagi kelompok masyarakat desa, memperkuat fondasi ekonomi lokal menuju masa depan yang lebih sejahtera.



3.5. Asset Produktif

Perkembangan asset produktif BUMDesa Bersama “Gempol Sejahtera” Kecamatan Gempol sejak berakhirnya program PNPB-MPd tahun 2014, modal awal tersebut digulirkan sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Modal Awal Eks. PNPB-MPd	Rp. 1.232.700.000,-
Asset Dana Bergulir Masyarakat	Rp. 2.527.647.817,-
Perkembangan Dana	Rp. 1.294.947.817,-
Prosentase Perkembangan Dana	100 %

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa total asset BUMDesa Bersama “Gempol Sejahtera” Kecamatan Gempol mengalami perkembangan/ peningkatan sebesar 100 %.

Adapun pada tahun 2017 BUMDesa Bersama “Gempol Sejahtera” Kecamatan Gempol membeli asset tetap berupa tanah senilai Rp. 40.000.000,-

Hasil dan Pembahasan

3) DISPOSISI

Disposisi dalam implementasi Program Pembiayaan Keuangan Mikro oleh BUMDESMA "Gempol Sejahtera," dapat diketahui bahwa disposisi yang baik dari para pelaksana kebijakan, yang mencakup dedikasi tinggi serta pemberian insentif yang memadai, sangat berkontribusi pada efektivitas implementasi program tersebut. Dedikasi para pelaksana memastikan bahwa kebijakan dijalankan dengan penuh komitmen, sementara insentif yang diberikan, terutama insentif pengembalian tepat waktu, berperan penting dalam menjaga motivasi dan disiplin kelompok usaha. Insentif ini, yang selalu diberikan kepada kelompok usaha di akhir tutup buku setelah disepakati dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban, tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota kelompok, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan kesuksesan Program Pembiayaan Keuangan Mikro di BUMDESMA "Gempol Sejahtera" Kecamatan Gempol.

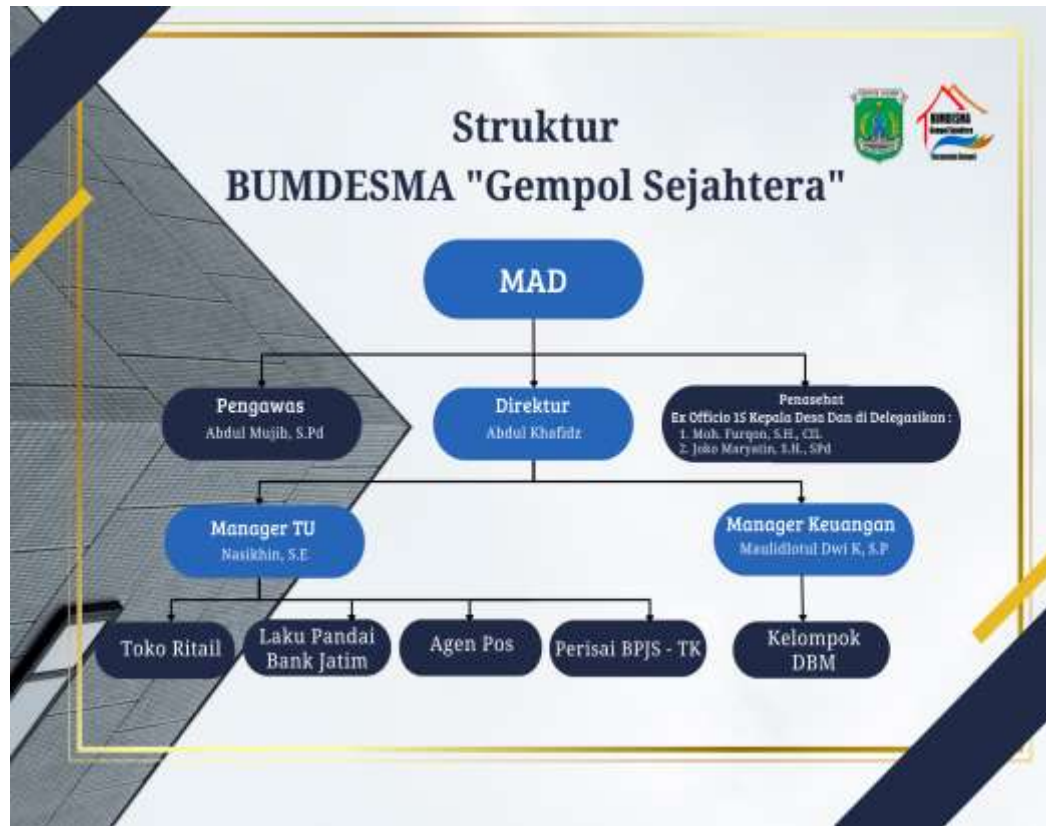
DAFTAR PENERIMAN INSENTIF PENGEMBALIAN TEPAK WAKTU (IPTW)
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA "GEMPOL SEJAHTERA"
SPP LUNAS JANUARI 2022 S/D DESEMBER 2022

No	Desa	Nama Kelompok	Piutang	IPTW	Tgl. Beres	Nama	Ttd
1	Cerai	Melan	Rp. 28.000,00	Rp. 420.000,00	24-9-23	Melan	
2		Mungah	Rp. 46.000,00	Rp. 490.000,00	21-9-23		
3		Jambe	Rp. 37.000,00	Rp. 490.000,00	21-9-23	Pakir	
4		Apel	Rp. 42.000,00	Rp. 430.000,00	06-9-23	Muthi'ul d.	
5	Gempol	Auri	Rp. 36.000,00	Rp. 540.000,00	24-2-23	Auri	
6		Angrek	Rp. 14.000,00	Rp. 210.000,00	12-4-23	Selvia	
7		Melati 1	Rp. 32.000,00	Rp. 490.000,00	12-4-23	" "	
8		Sejahtera 1	Rp. 36.000,00	Rp. 540.000,00	12-4-23	H. Nur	
9	Wanasari	Mawar	Rp. 29.000,00	Rp. 435.000,00	24-05-23	Purni	
10	Watasok	Teratai 1	Rp. 40.000,00	Rp. 690.000,00	13-4-2023	SUMARAH	
11		Teratai 2	Rp. 48.000,00	Rp. 720.000,00	13-4-2023	SUMARAH	
12		Maja Jaya 1	Rp. 25.000,00	Rp. 385.000,00	12-4-2023	g. Joso	
13		Maja Jaya 2	Rp. 25.000,00	Rp. 375.000,00	12-4-2023	g. Joso	
14	Bulanari	Mawar 1	Rp. 37.000,00	Rp. 555.000,00	12-4-2023	Purni	
15	Legak	Nyaring Indah 1	Rp. 37.000,00	Rp. 555.000,00	28-04-23	MARIAH	
16		Angrek papua 1	Rp. 29.000,00	Rp. 435.000,00	" "	SUKSESATI	
17		Angrek papua 2	Rp. 43.000,00	Rp. 645.000,00	" "	SUKSESATI	
18		Asuraga	Rp. 47.000,00	Rp. 705.000,00	27-05-23	H. Nur	
19		Melati 1	Rp. 30.000,00	Rp. 450.000,00	27-05-23	" "	
20	Karang Rejo	Sanghad Jaya	Rp. 30.000,00	Rp. 450.000,00	28-5-2023	ELA BUSIANA	
21		Kalinya	Rp. 23.000,00	Rp. 345.000,00	29-5-2023	Siti Fatmahan	
22	Nyaring	Nyaring	Rp. 39.000,00	Rp. 585.000,00	25-05-2023	H. Nur	
23		Kambeja	Rp. 37.000,00	Rp. 555.000,00	" "	H. Nur	
24		Angrek	Rp. 40.000,00	Rp. 600.000,00	" "	" "	
25		Cempaka	Rp. 22.000,00	Rp. 330.000,00	" "	" "	
26	Wanasari	Alamanda 1	Rp. 67.000,00	Rp. 1.005.000,00	10-04-2023	Sani	
27		Alamanda 2	Rp. 20.000,00	Rp. 300.000,00	10-04-2023	Sani	
28		Seraja 1	Rp. 35.000,00	Rp. 525.000,00	2-07-2023	SUKSESATI	
29		Seraja 2	Rp. 48.000,00	Rp. 690.000,00	2-07-2023	SUKSESATI	
30		Seraja 3	Rp. 13.000,00	Rp. 195.000,00	24-07-2023	" "	
31		Kambeja	Rp. 48.000,00	Rp. 690.000,00	13-05-2023	Kanti	
TOTAL			Rp. 1.114.500,00	Rp. 16.717.500,00			

Hasil dan Pembahasan

4) STRUKTUR BIROKRASI

Hasil wawancara dengan manager tata usaha, manager keuangan dan ketua kelompok usaha terkait struktur birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir di BUMDESMA "Gempol Sejahtera" sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program, khususnya dalam program pembiayaan keuangan mikro. Struktur yang baik memastikan bahwa setiap anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka, yang menghindarkan kebingungan dan konflik yang bisa menghambat program. Jika struktur birokrasi tidak kondusif, sumber daya manusia dan finansial yang tersedia bisa menjadi tidak efektif, yang dapat menurunkan kualitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan pembagian tugas di antara unit kerja menjadi langkah penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Semua narasumber sepakat bahwa tanpa struktur birokrasi yang kuat, program tidak akan berjalan dengan optimal.



Kesimpulan

Program pembiayaan keuangan mikro yang dijalankan oleh BUMDESMA "Gempol Sejahtera" telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Kecamatan Gempol. Keberhasilan implementasi program ini dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu:

1

Komunikasi: BUMDESMA "Gempol Sejahtera" telah berhasil menjaga komunikasi yang jelas, konsisten, dan efektif antara pembuat kebijakan, implementor, dan kelompok sasaran. Komunikasi yang baik memastikan bahwa seluruh pihak memahami tujuan dan prosedur program, sehingga dapat mengurangi risiko distorsi dalam pelaksanaan

2

Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya finansial yang memadai serta tenaga kerja yang kompeten dan terlatih menjadi pilar utama dalam keberhasilan program. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan program tidak akan berjalan efektif, terutama dalam hal penyaluran dana dan pelatihan bagi kelompok usaha perempuan

Kesimpulan

3

Disposisi: Sikap dan karakteristik implementor, seperti dedikasi, komitmen, dan kejujuran, memainkan peran penting dalam memastikan kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya. Pengangkatan personel yang memiliki dedikasi terhadap kepentingan warga, serta pemberian insentif yang tepat, membantu mendorong implementor untuk melaksanakan kebijakan dengan baik

4

Struktur Birokrasi: Struktur organisasi yang tertata dengan baik di dalam BUMDESMA “Gempol Sejahtera” memastikan alur koordinasi yang efisien dan peran yang jelas bagi setiap anggota organisasi. Birokrasi yang mendukung dan SOP yang jelas memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan minim konflik

Secara keseluruhan, program ini berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian finansial perempuan di Kecamatan Gempol, sekaligus menunjukkan bagaimana keempat variabel tersebut saling berinteraksi untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pengelolaan yang baik dari keempat aspek ini memungkinkan BUMDESMA “Gempol Sejahtera” untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi secara optimal.

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Manager Tata Usaha



Lokasi Penelitian Kecamatan Gempol



Wawancara Bersama Manager Keuangan



Wawancara Bersama Ketua Kelompok Alamanda



Wawancara Bersama Ketua Kelompok Angrek Papua

Referensi

- Ketentuan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014, Karya berada pada domain publik di Indonesia
- Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: CSIS, t.t).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Pasal. 87, 88, 89).
- Herlambang P. Wiratman, Iuris Muda, (Yogyakarta: Penerbit Harfeey, 2019), hlm. 72-73
- Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, (Yogyakarta: PSP UGM, 2013), hlm. 332.
- Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. **Jatim Newsroom** - Surabaya : 28 Oktober 2022
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT No. 136 Tahun 2022, Jakarta
- Laporan Aset keuangan badan usaha milik desa bersama “Gempol Sejahtera” Kecamatan Gempol, tahun 2022
- Kompasiana.com dengan judul "Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Manajemen Waktu dan Sumber Daya" 21 November 2023
- Peran Kelompok Wanita dan Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Kaum Perempuan Perdesaan, Dr. Wasman, M.AgDr. Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.SiWartoyo, M.S.I
- George III Edward C, Public Policy Implementing, London: Jai Press Inc, 1990), (dalam Subarsono, 2011:90-92)

Referensi

- Fitrotun Niswah Universitas Negeri Surabaya | UNESA · Departemen Administrasi Publik: *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung*, Juni 2021
- I Gde Kajeng Baskara, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, e-mail : kajengbaskara@yahoo.com, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013
- JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol. 9, No. 01, Juni 2022, hal 52-71
- Larasati, D.C. (2017). Evaluasi Program Inovasi “Sunset Policy” di Kota Malang Guna Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkantoran. *Jurnal Reformasi*, 7(1), 19–28.
- Y. Gede Sutmasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Bali ygdsutmasa@gmail.com, Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. February 2021
- Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, Dra. Elly Fatimah, M.Si -Virtual Public Lecture Analis Kebijakan Seri Ke-12, Kamis (9/9/2021).
- Pengertian Implementasi Kebijakan-[151801109_file 5.pdf \(uma.ac.id\)](#)
- Lenvari Journal of Social Science 1(1):23-32 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil-firman.firdausi88@gmail.com
- https://setneg.go.id/baca/index/transformasi_birokrasi_menuju_organisasi_yang_adaptif_agile_dan_fluid



